

Naskah Publikasi

**PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA
KEPAILITAN**

Studi Kasus Di Pengadilan Niaga Semarang



Disusun dan Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

DIMAS GHERRY ADE DUANDANA

C.100.070.092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

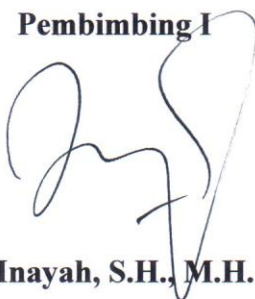
HALAMAN PENGESAHAN

Naskah publikasi skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dosen Pembimbing Naskah Publikasi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Inayah, S.H., M.H.)

Pembimbing II

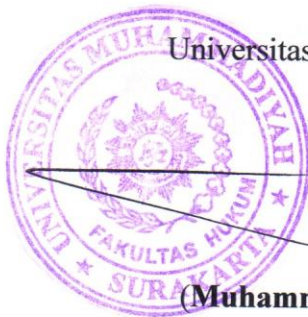


(Darsono, S.H., M.Hum.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muhammad Iksan, SH. M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Bismillahirrahmannirrohim.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : DIMAS GHERRY ADE DUANDANA
NIM : C 100.070.092
Fakultas/Jurusan : HUKUM/Ilmu Hukum
Jenis : SKRIPSI
Judul : **PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA
KEPAILITAN** (Studi Kasus Di Pengadilan Niaga
Semarang)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan,
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademiskepada Perpustakaan UMS, tanpa minta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta, dan
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagai mestinya.

Surakarta, Juli 2012

Yang menyatakan,

DIMAS GHERRY ADE D

ABSTRAK

PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PENGADILAN NIAGA SEMARANG)

**DIMAS GHERRY ADE DUANDANA, C100070092, FAKULTAS
HUKUM, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2012.**

Pembuktian Sederhana adalah pembuktian mengenai (1) Eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo (2) Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan. Dalam Perkara Kepailitan harus menerapkan pembuktian sederhana, Dimana pembuktian ini merupakan penerapan dari Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan yakni Bahwa Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Maksud “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

Penerapan Pembuktian Sederhana dalam praktik di Pengadilan Niaga harus sesuai dengan penerapannya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang telah mengatur proses pembuktian tersebut. Dengan begitu Pasal 8 ayat (4) merupakan penjabaran dari proses Pembuktian Sederhana.

Dalam menerapkan Pembuktian Sederhana, kadangkala Majelis Hakim mengalami hambatan ketika memutuskan perkara untuk masuk dalam ranak perkara gugatan perdata atau perkara permohonan Kepailitan. Disisi lain kendala yang terjadi bukan hanya disitu saja melainkan dalam menafsirkan Eksistensi Pembuktian Sederhana itu sendiri.

Kata kunci : Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan

ABSTRACT
SIMPLE EVIDENCE IN BANKRUPTCY CASE
(COMMERCIAL COURT CASE STUDY SEMARANG)

**DIMAS GHERRY ADE DUANDANA, C100070092, FACULTY OF LAW,
UNIVERSITY MUHAMMADIYAH OF SURAKARTA 2012**

Simple proof is the proof of (1) The existence of a debt which the debtor filed bankruptcy, which has matured (2) The existence of two or more creditor of debtors who filed bankruptcy. In a Bankruptcy Case shall apply the simple proof, where proof is an application of Article 8, paragraph (4) Bankruptcy Act the bankruptcy application materials must be granted if there are any facts or circumstances which proved to be simple. Mean "the facts or circumstances which proved to be simple" is the fact of two or more creditors and the fact that the debt was due and not paid.

Simple Application of Evidence in practice in the Commercial Court shall be in accordance with the application of Article 2 paragraph (1) Bankruptcy Act which has set the authentication process. Thus Article 8, paragraph (4) the elaboration of the simple proof.

In applying the simple proof, the judges sometimes have problems when it decided the case for entry in a civil lawsuit or a case of petition for bankruptcy. On the other hand the obstacles that occur not only there but in interpreting it Simple Proof of Existence it self.

Keys word : Simple Evidence In Bankruptcy Case

PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN

(STUDI KASUS PENGADILAN NIAGA SEMARANG)

A. Pendahuluan

Permasalahan yang terjadi dalam perkara kepailitan adalah mengenai penerapan Pembuktian Sederhana dikarenakan permasalahan penerapan tersebut tidak dijelaskan baik pengertian maupun batasan-batasan yang secara jelas diterapkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya, Undang-Undang Kepailitan). Undang-undang hanya menentukan apa yang telah tertuang dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan sebagai berikut :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) merupakan syarat kepailitan bahwa

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Dengan begitu telah menimbulkan banyak pertanyaan, Apakah perkara kepailitan yang timbul karena adanya utang yang tidak dipenuhi dapat dibuktikan secara sederhana atau tidak? Jika dalam memeriksa dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, apakah majelis hakim dapat memutus perkara kepailitan begitu saja tanpa melihat pertimbangan lain? Apakah majelis hakim hanya semata-mata menerapkan

aturan hukum dan mengabaikan parameter lain? Hal-hal tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-undang, sehingga penyelesaian masalah-masalah itu sepenuhnya tergantung pada pertimbangan majelis hakim.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat penulis rumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pembuktian Sederhana dalam praktik di Pengadilan Niaga atas perkara kepailitan?
2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam penerapan Pembuktian Sederhana?

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pembuktian Sederhana dalam praktik di Pengadilan Niaga atas perkara kepailitan.
2. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan Pembuktian Sederhana.

Didalam penelitian mempunyai harapan agar hasil penelitiannya bermanfaat bagi :

1. Menambah wawasan bagi masyarakat tentang penerapan Pembuktian Sederhana dalam praktik di Pengadilan Niaga.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembaca terutama dapat dijadikan konsep maupun teori, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian dengan pendekatan *Yuridis Sosiologi*. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Niaga Semarang

4. Sumber Data :

a) Data Primer : Putusan Nomor : 07/Pailit/2010/PN. Niaga. Smg., tanggal 12 Juli 2010 dan Putusan Nomor : 11/Pailit/2010/PN. Niaga. Smg., tanggal 30 November 2010.

b) Data Sekunder : Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut a) Studi Kepustakaan, b) Studi Dokumen, dan c) *Interview*.

B. Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Praktik Di Pengadilan Niaga Atas Perkara Kepailitan

Pada Pasal 8 ayat (4) *jo* Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa *“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana”*.

Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dimaksudkan dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan Pasal 8 ayat (4) adalah *adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah Utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit*.

Dalam penyelesaian suatu kasus kepailitan, dianut suatu asas Pembuktian Sederhana. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari hukum kepailitan yaitu untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Dengan dianutnya asas Pembuktian Sederhana seyogyanya salah satu tujuan dari hukum kepailitan yaitu ”cepat” dapat “tercapai”. Maka dari itu untuk memberikan suatu gambaran tentang bagaimanakah penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan, penulis memberikan hasil penelitian berupa :

1. Putusan Pengadilan Niaga yang menerima suatu permohonan kepailitan karena telah terbuktinya suatu Pembuktian Sederhana. Dalam Perkara CV. Bengawan Solo, Andy Budyono, dan Adi Kristanto *melawan* H. Ibnu Abbas dan Rian Harianto dengan Putusan Nomor : 07/Pailit/2010/PN. Niaga. Smg., tanggal 12 Juli 2010.

a. Hasil Penelitian :

CV. Bengawan Solo (Termohon Pailit) merupakan suatu persekutuan perdata yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan Akta No. 20 pada tanggal 29 Juli 2008 dihadapan Notaris, Yang menyatakan pada intinya bahwa tuan Andy Budyono bertindak sebagai satau-satunya persero yang mengurus dan menanggung segalanya, dan tuan Adi Kristanto adalah sebagai persero komanditer yang tidak menanggung lebih dari jumlah saham Tuan Adi Kristanto adalah 0% dan Tuan Andy Budyono sebesar 100%.

H. Ibnu Abbas (Pemohon Pailit I) mempunyai piutang kepada CV. Bengawan Solo berdasarkan perjanjian *Purchase Order*, hal mana H. Ibnu Abbas sebagai rekanan (suplyer) dari CV. Bengawan Solo yang telah memperoleh bahan baku berupa pengiriman barang (kulit) yang dibutuhkan oleh CV. Bengawan Solo dari periode November 2003 sampai dengan Juli 2008 yang belum terbayarkan dan telah jatuh tempo.

Dalam Surat Pernyataannya tertanggal 3 April 2010, Termohon Pailit telah mengakui memiliki utang dan telah jatuh waktu kepada H. Ibnu Abbas.

Selain kreditor H. Ibnu Abbas, diketahui bahwa CV. Bengawan Solo juga telah mempunyai utang dengan Bapak Rian Harianto sebesar Rp. 415.000.000,-(Empat ratus lima belas juta rupiah) dengan perhitungan perjanjian peminjaman uang tertanggal 25 Oktober 2009.

Perhitungan utang sampai dengan pertanggal 30 April 2010 jumlah kewajiban pembayaran kembali atau utang CV. Bengawan Solo adalah

Utang pengiriman kulit periode tahun 2006 kepada H. Ibnu Abbas dan total Utang terhadap Rian Harianto.

Selain mempunyai utang kepada H. Ibnu Abbas dan Rian Harianto juga mempunyai utang kepada Sonny, sehingga disini mengenai unsur memiliki dua kreditor atau lebih telah terpenuhi.

b. Pembahasan :

Dalam menerapkan Pembuktian Sederhana, hal yang harus dibuktikan adalah :

a. Kebenaran adanya dua kreditor atau lebih yang mempunyai hubungan hukum dengan debitor;

Adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Termohon Pailit berupa perjanjian *Purchase Order*, Perjanjian Peminjaman Uang secara tertulis dan Perjanjian Peminjaman Utang secara Lisan. Dengan terbuktinya perjanjian yang ada, maka menimbulkan kedudukan Pemohon Pailit I/ H. Ibnu Abbas dan Pemohon Pailit II/ Rian Harianto menjadi Kreditor, serta dapat menunjukkan fakta lain berupa adanya Kreditor lain, yakni Saksi Eric May Neteu. Unsur mengenai keberadaan dua Kreditor atau lebih dapat terpenuhi.

Dalam Perkara tersebut, para Kreditor merupakan Kreditor Konkoren yang mempunyai hak *pari passu* dan *pro rata*. para Kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-

masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan Debitor.¹

- b. Kebenaran adanya minimal salah satu utang yang belum dibayar lunas, serta;

Dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan, tentang definisi utang tersebut, bahwa utang yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan adalah utang yang tidak hanya timbul sebagai akibat adanya perjanjian pinjam-meminjam uang saja, namun utang yang timbul berdasarkan Undang-Undang.

Kualifikasi keberadaan utang CV. Bengawan Solo terhadap Para Pemohon Kepailitan didasarkan pada 3 (tiga) jenis perjanjian, yakni Perjanjian *Purchase Order* (Pemohon Pailit I), Perjanjian Peminjaman Uang secara tertulis/otentik dan Perjanjian Peminjaman Utang secara lisan.

Utang terhadap Pemohon Pailit I, dapat terbukti dengan adanya Surat Pernyataan Pengakuan Utang antara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit

Utang terhadap Pemohon pailit II, Utang dimaksudkan berdasarkan Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 25 Oktober 2009 dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon Pailit II dan Termohon Pailit serta berdasarkan Pinjaman Utang secara lisan.

- c. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

¹ Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 5.

Bukti tersebut antara lain, terhadap Pemohon Pailit I bahwa adanya Surat Pernyataan Pengakuan Utang tertanggal 30 April 2010 yang merupakan bukti otentik yang kuat dan menyebabkan secara langsung Termohon Pailit telah mengakui utang-utangnya dan antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit II Berdasarkan Perjanjian peminjaman uang tanggal 25 Oktober 2009 dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon Pailit II dan Termohon Pailit.

Hakim dalam perkara tersebut menerapkan Teori Pembuktian Terikat, yang artinya hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh pihak berperkara, jadi harus memberikan putusan selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.² Maka dari itu Hakim dalam penerapan Pembuktian Sederhana sangat terikat dengan alat bukti yang diajukan.

Konsep utang menjadi sangat penting dan esensial (menentukan) karena tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada, karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para Kreditornya.³

2. Putusan Pengadilan Niaga yang menolak suatu permohonan kepailitan dengan alasan tidak terbukti secara sederhana. Dalam Perkara ini, PT. Diana Plastik Industri, Teguh Cahyadi *melawan* Sutanto Rindra Surta dan

² Bachtiar Efendi, Masdari Tasmin, A.Chodari. 1991. *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hal. 53-54.

³ M. Hadi Shubhan. 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 34.

Sugeng dengan Putusan Nomor : 11/Pailit/2010/PN. Niaga. Smg., tanggal 30 November 2010.

a. Hasil Penelitian

Sutanto Rindra Surta (Pemohon Pailit I) adalah pemilik modal RIMA *Heather Electric* yang bergerak dibidang penyediaan jasa dan perawatan mesin industry.

Bulan Agustus 2008 PT. DIANA SAKTI SURYA PLASTIK INDUSTRI (Termohon Pailit) memesan jasa Penyediaan jasa kepada Pemohon Pailit I. Dia sepakat untuk menyediakan barang-barang dengan harga keseluruhan sejumlah Rp. 2.021.100,- (Dua juta dua puluh satu ribu rupiah) dengan syarat pembayaran secara kontan.

Selain itu, Sugeng (Pemohon Pailit II) merupakan pemilik Perusahaan MANUNGGA L KARS A yang bergerak dibidang penyediaan jasa pengiriman barang. Pada rentang waktu bulan Januari hingga Agustus Termohon Pailit memesan jasa pengiriman barang-barang berupa kantong plastic dengan tujuan Purwokerto kepada Perusahaan MANUNGGA L RASA.

Mereka melakukan kesepakatan untuk mengirim barang-barang tersebut dengan syarat pembayaran dalam tempo satu bulan. Jasa pengiriman barang tersebut dengan biaya Rp. 3.541.910,-(Tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah)

Dalam memenuhi kewajibannya, Termohon Pailit membayar utang kepada para pihak pemohon pailit melalui *Konsignasi* di Pengadilan Negeri baik terhadap Pemohon Pailit I di Pengadilan Negeri Surakarta dan

Pemohon Pailit II di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dengan adanya Pemeriksaan dan Penetapan di Pengadilan Negeri tersebut maka kewajiban Termohon Pailit telah terpenuhi, akan tetapi *Konsignasi* tersebut belum juga dilaksanakan.

Selain Sutarto dan Sugeng, PT. Diana Plastik Industri juga memiliki Utang berupa gaji dengan para buruh/karyawannya yang merupakan Kreditor lain.

b. Pembahasan

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, bahwa yang dimaksudkan dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:⁴

- 1) Eksistensi dari suatu utang Debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;
- 2) Eksistensi dari dua atau lebih Kreditor dari Debitor yang dimohonkan kepailitan.

Adanya *Konsignasi* tersebut ditetapkan setelah adanya permohonan kepailitan. Hakim tidak memahami secara benar tentang adanya *Konsignasi*. Pemahaman tentang adanya *Konsignasi*, jika dilihat berdasarkan Pasal 1404 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa “Jika si berpiutang menolak pembayaran dari yang berutang, maka pihak yang berutang dapat melakukan pembayaran tunai utangnya dengan menawarkan pembayaran yang dilakukan oleh jurusita dengan disertai 2

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.141.

(dua) orang saksi. Apabila yang berpiutang menolak menerima pembayaran, maka uang tersebut dititipkan pada kas kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagai titipan/ *konsignasi*”.

Pasal tersebut jika diterapkan secara benar dan dihubungkan dengan Perkara PT. Diana Sakti Surya Plastik Industri, maka terdapat *inkonsistensi* keberadaan penerapan hukumnya.

Inkonsistensi dimaksud adalah bahwa Termohon Pailit/Debitor dapat mengajukan *Konsignasi* di Pengadilan Negeri setempat, jika Kreditor menolak pembayaran tunai, maka Debitor dapat melakukan penawaran pembayaran diikuti penyimpanan atau penitipan (*Konsignasi*). Akan tetapi hal ini menjadi terbalik, karena Kreditor yang menagih utang selalu tidak dibayarkan kewajibannya oleh Debitor. Hal tersebut didasarkan pada keterangan Saksi Yosi Aryono dan Saksi Soegijono, dengan menyatakan hal yang sama, yakni Para saksi pernah menagih beberapa kali kepada Termohon Pailit tetapi tidak mendapatkan respon dan tanggapan yang memuaskan.

Majelis Hakim memandang terlalu sempit tentang keikutsertaan pihak ketiga dalam permohonan kepailitan. Disamping itu pula, bahwa Karyawan/Buruh dapat disebut sebagai Kreditor Preferen. Kreditor Preferen (yang diistimewakan), yaitu Kreditor yang oleh Undang-Undang, semata-mata karena sifat piUtangnya, mendapatkan pelunasan terlebih

dahulu. Hal ini menjadikan Buruh/karyawan sebagai Kreditor yang diistimewakan karena dilihat berdasarkan sifat piutangnya.⁵

C. Hambatan Dalam Penerapan Pembuktian Sederhana

1. Berdasarkan Putusan No. 7/Pailit/2010/PN. Niaga. Smg., terdapat hambatan dalam memutus perkara, yaitu :
 - a. Hakim tidak melihat parameter atau pertimbangan lain mengenai eksistensi utang yang timbul antara Debitor dengan Kreditor, hal ini memberikan ketidakpastian hukum mengenai penerapan unsur Pembuktian Sederhana itu sendiri. Ketidakpastian ini terletak dimana Hakim tidak melihat kepentingan-kepentingan dan hak-hak Debitor.
 - b. Hakim sangat terikat dengan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon Pailit dengan mengesampingkan alasan-alasan Termohon Pailit. Majelis hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.
2. Berdasarkan Putusan No. 11/Pailit/2010/PN. Niaga. Smg., terdapat hambatan dalam memutus perkara, yaitu :
 - a. Adanya *Inkonsistensi* Penerapan hukum yang menimbulkan pemahaman hakim mengenai *Konsignasi* tidak berjalan secara benar.
 - b. Mengenai utang terhadap Buruh berupa gaji yang tidak terbayarkan dianggap oleh hakim merupakan Utang diluar lingkup perkara kepailitan dan masuk dalam perselisihan industrial

⁵ Jono. *Op.cit.*

- c. Buruh dianggap bukan merupakan seorang Kreditor. Pada kenyataannya dalam penjelasan Undang-Undang Kepailitan, Buruh dapat disebut sebagai Kreditor Preferen.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Praktik Di Pengadilan Niaga Atas Perkara Kepailitan

- a. Berdasarkan Putusan Nomor : 07/Pailit/2010/PN. Niaga. Smg., memenangkan H. Ibnu Abbas dan Rian Harianto dan menyatakan bahwa CV. Bengawan Solo, Andy Budyono, dan Adi Kristanto dalam keadaan Pailit dengan alasan terbukti secara sederhana.

- 1) Kebenaran adanya dua kreditor atau lebih yang mempunyai hubungan hukum dengan debitor
- 2) Kebenaran adanya minimal salah satu utang yang belum dibayar lunas, serta;
- 3) Utang tersebut telah jatuh dan dapat ditagih.

Kualifikasi eksistensi Penerapan Pembuktian sederhana pada perkara CV. Bengawan Solo terhadap Para Pemohon Kepailitan didasarkan pada 3 (tiga) jenis perjanjian, yakni Perjanjian *Purchase Order* (Pemohon Pailit I), Perjanjian Peminjaman Uang secara tertulis/otentik dan Perjanjian Peminjaman Utang secara lisan.

- b. Berdasarkan Putusan Nomor : 11/Pailit/2010/PN. Niaga. Smg., memenangkan pihak PT. Diana Plastik Industri yang merupakan Termohon Pailit dengan pertimbangan tidak terbukti secara sederhana.

- 1) Mengenai eksistensi dari suatu utang Debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo.
- 2) Mengenai eksistensi dari dua atau lebih Kreditor dari Debitor yang dimohonkan kepailitan.

Adanya *Konsignasi* tersebut ditetapkan setelah adanya permohonan kepailitan. Hakim tidak memahami secara benar tentang adanya *Konsignasi* maka, unsur utang maupun kedudukannya sebagai Kreditor telah hapus dikarenakan dengan adanya *Konsignasi* tersebut.

Inkonsistensi dimaksud adalah bahwa Termohon Pailit/Debitor dapat mengajukan *Konsignasi* di Pengadilan Negeri setempat, jika Kreditor menolak pembayaran tunai, maka Debitor dapat melakukan penawaran pembayaran diikuti penyimpanan atau penitipan (*Konsignasi*). Akan tetapi hal ini menjadi terbalik, karena Kreditor yang menagih utang selalu tidak dibayarkan kewajibannya oleh Debitor.

Hambatan Dalam Penerapan Pembuktian Sederhana

- a. Berdasarkan Putusan No. 7/Pailit/2010/PN. Niaga. Smg, adalah :
 - 1) Hakim tidak melihat parameter atau pertimbangan lain mengenai eksistensi utang yang timbul antara Debitor dengan Kreditor
 - 2) Hakim sangat terikat dengan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon Pailit dengan mengesampingkan alasan-alasan Termohon Pailit.

b. Berdasarkan Putusan No. 11/Pailit/2010/PN. Niaga. Smg., adalah :

- 1) Adanya *Inkonsistensi* Penerapan hukum yang timbul mengenai pemahaman Konsigasi itu sendiri.
- 2) Utang terhadap Buruh berupa gaji yang tidak terbayarkan dianggap oleh hakim merupakan Utang diluar lingkup perkara kepailitan dan masuk dalam perselisihan industrial.
- 3) Buruh dianggap bukan merupakan seorang Kreditor.

2. Saran

Melakukan segala yang berkaitan dengan hukum hendaknya dipahami secara benar, sehingga akan tercipta penerapan hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bachtiar Efendi, Masdari Tasmin, A.Chodari. 1991. *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

M. Hadi Shubhan. 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.